



DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

MENGAPA PSETK DIPERLUKAN ?



Disampaikan pada acara Training of Trainers PSETK
Jakarta , 9 Oktober 2018



REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PEMBANGUNAN DAERAH ?

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

(Pasal 258 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014)

TUJUAN

Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.



URUSAN
PEMERINTAHAN
(UU NO. 23
TAHUN 2014)

ABSOLUT

1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR NEGERI
6. MONETER & FISKAL

URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM

KONKUREN

WAJIB
(24)

PILIHAN
(8)

- pendidikan
- kesehatan
- pekerjaan umum dan Penataan Ruang
- perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
- sosial.

YAN DASAR
(6)

NON YAN
DASAR (18)

1. Kelautan & Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. ESDM
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi



PEMBINAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Mendagri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:

- a. pembagian Urusan Pemerintahan;
- b. kelembagaan Daerah;
- c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
- d. keuangan Daerah;
- e. pembangunan Daerah;
- f. pelayanan publik di Daerah;
- g. kerja sama Daerah;
- h. kebijakan Daerah;
- i. kepala Daerah dan DPRD; dan
- j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMBANGUNAN
DAERAH

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTORAT
PERENCANAAN,
EVALUASI DAN
INFORMASI
PEMBANGUNAN
DAERAH

DIREKTORAT
SINKRONISASI
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH I

DIREKTORAT
SINKRONISASI
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH II

DIREKTORAT
SINKRONISASI
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH III

DIREKTORAT
SINKRONISASI
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH IV

TUGAS DITJEN BINA BANGDA

Menyelenggarakan perumusan dan pelaks kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah



PENDEKATAN SEKTORAL

- Sektor apa yang perlu dikembangkan
- berapa banyak harus diproduksi
- Dimana aktivitas sektor akan dijalankan

PENDEKATAN KEWILAYAHAN

- daerah mana yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan
- sektor apa yang sesuai untuk dikembangkan

INTEGRASI

PEMBINAAN KEWILAYAHAN



PEMBAGIAN WILAYAH NEGARA

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945

- NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang
- Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945



POLITIK PEMBANGUNAN ?



**TABEL 3.4
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
DI WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2010—2014**

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%) ¹⁾		Kemiskinan (%) ²⁾		Pengangguran (%) ³⁾	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014
DKI Jakarta	6,5 – 7,1	6,9 – 7,7	2,75 – 2,69	0,54 – 0,53	10,3 – 11,4	8,3 – 9,2
Jawa Barat	5,0 – 5,6	6,2 – 6,8	9,12 – 8,91	4,15 – 4,12	10,4 – 11,5	8,8 – 9,8
Jawa Tengah	6,2 – 6,8	7,1 – 7,7	14,92 – 14,34	11,58 – 11,37	7,1 – 7,8	5,4 – 6,0
DI Yogyakarta	4,8 – 5,3	6,2 – 6,9	15,36 – 15,03	11,87 – 10,76	5,5 – 6,1	4,3 – 4,7
Jawa Timur	5,8 – 6,4	7,1 – 7,8	14,62 – 14,24	11,23 – 10,95	6,5 – 7,2	5,7 – 6,3
Banten	5,9 – 6,4	6,5 – 7,2	6,79 – 6,23	3,13 – 3,09	15,4 – 17,0	14,9 – 16,5
Bali	5,8 – 6,1	6,8 – 7,3	4,12 – 4,01	1,12 – 1,11	4,4 – 4,9	3,4 – 3,7

Sumber : Perhitungan Bappenas; BPS; Susenas

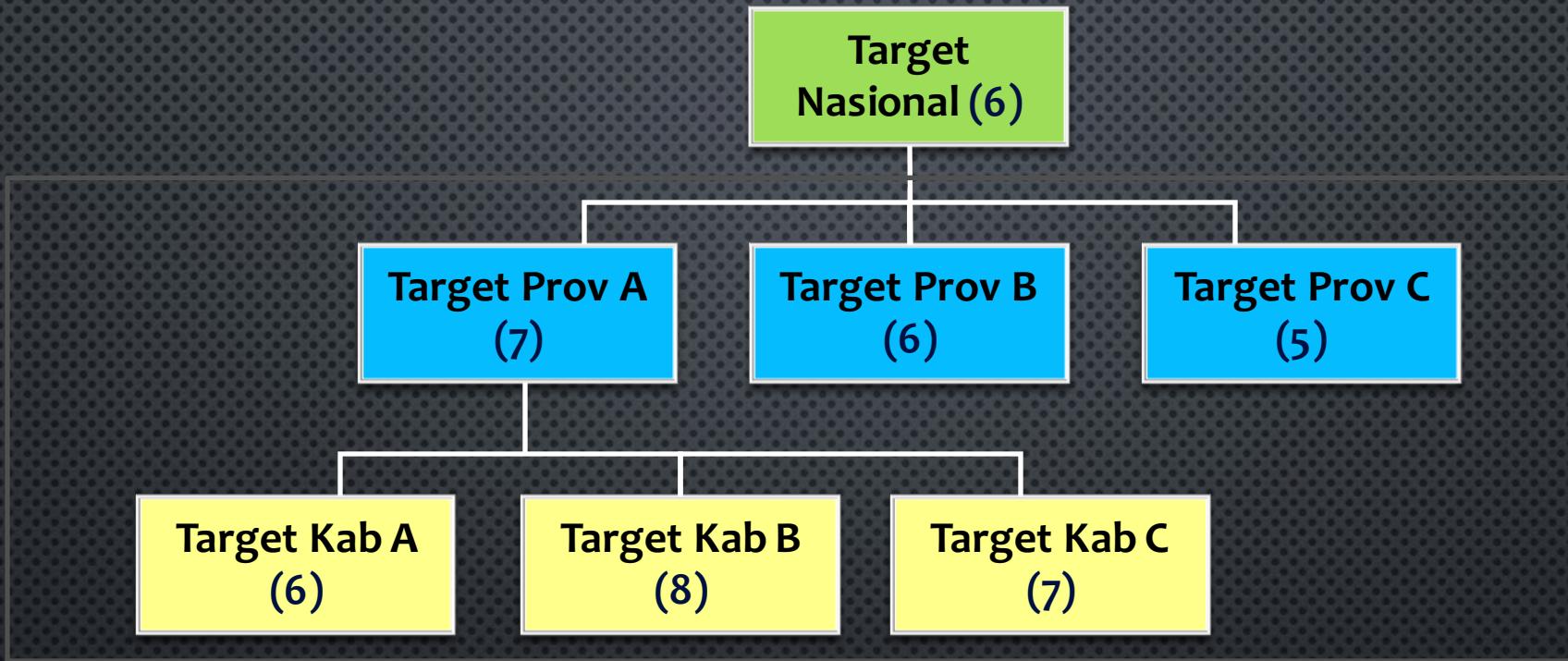
*Keterangan: 1) Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2) Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.

3) Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.



TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL



**TABEL 3.4
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
DI WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2010—2014**

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%) ¹⁾		Kemiskinan (%) ²⁾		Pengangguran (%) ³⁾	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014
DKI Jakarta	6,5 – 7,1	6,9 – 7,7	2,75 – 2,69	0,54 – 0,53	10,3 – 11,4	8,3 – 9,2
Jawa Barat	5,0 – 5,6	6,2 – 6,8	9,12 – 8,91	4,15 – 4,12	10,4 – 11,5	8,8 – 9,8
Jawa Tengah	6,2 – 6,8	7,1 – 7,7	14,92 – 14,34	11,58 – 11,37	7,1 – 7,8	5,4 – 6,0
DI Yogyakarta	4,8 – 5,3	6,2 – 6,9	15,36 – 15,03	11,87 – 10,76	5,5 – 6,1	4,3 – 4,7
Jawa Timur	5,8 – 6,4	7,1 – 7,8	14,62 – 14,24	11,23 – 10,95	6,5 – 7,2	5,7 – 6,3
Banten	5,9 – 6,4	6,5 – 7,2	6,79 – 6,23	3,13 – 3,09	15,4 – 17,0	14,9 – 16,5
Bali	5,8 – 6,1	6,8 – 7,3	4,12 – 4,01	1,12 – 1,11	4,4 – 4,9	3,4 – 3,7

Sumber : Perhitungan Bappenas; BPS; Susenas

*Keterangan: 1) Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2) Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.

3) Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.

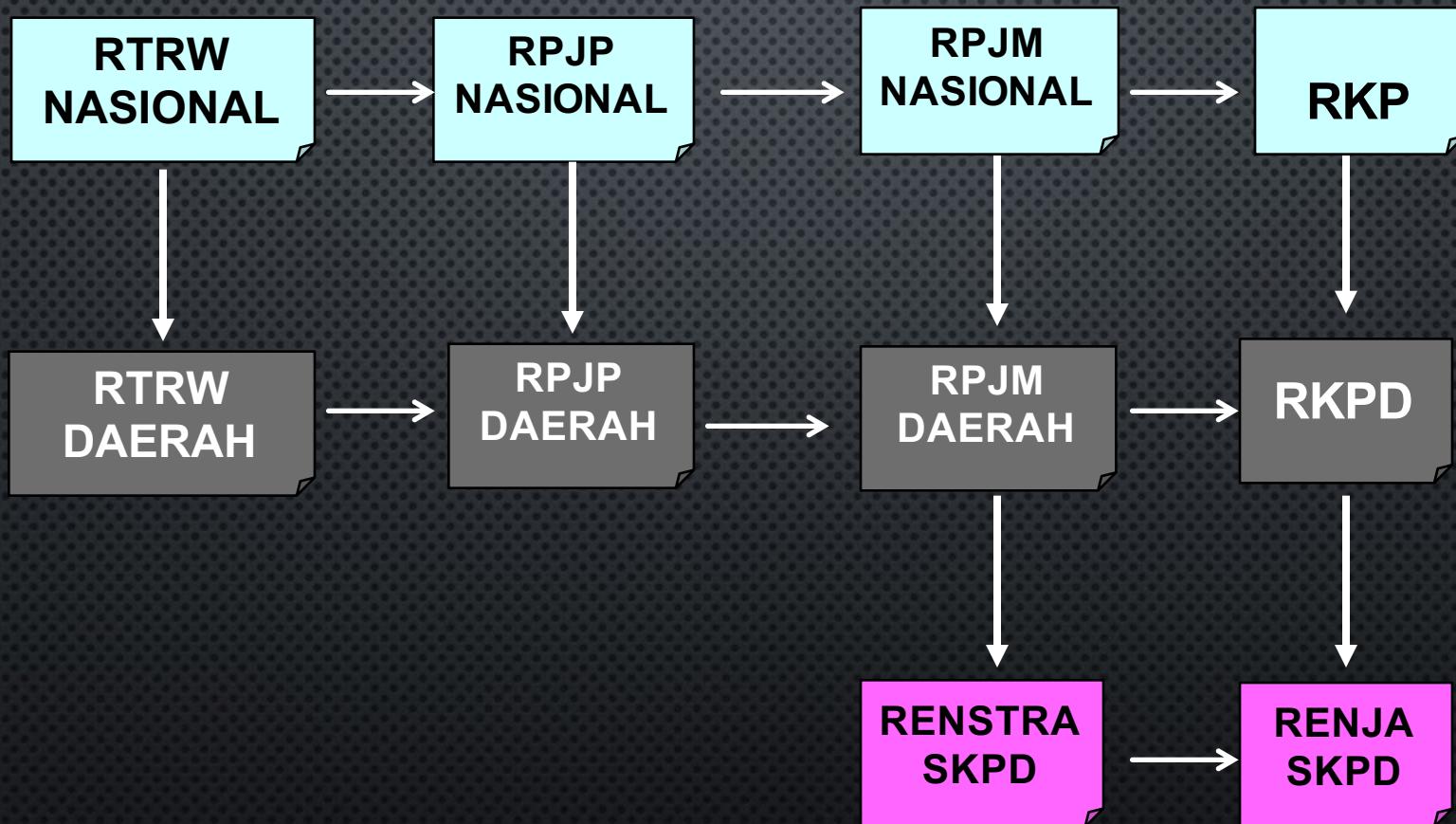
UU NO. 23 TAHUN 2014 (Pasal 259 ayat 1 dan 2)

1. Untuk mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah

2. Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah dikoordinasikan oleh Mendagri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan

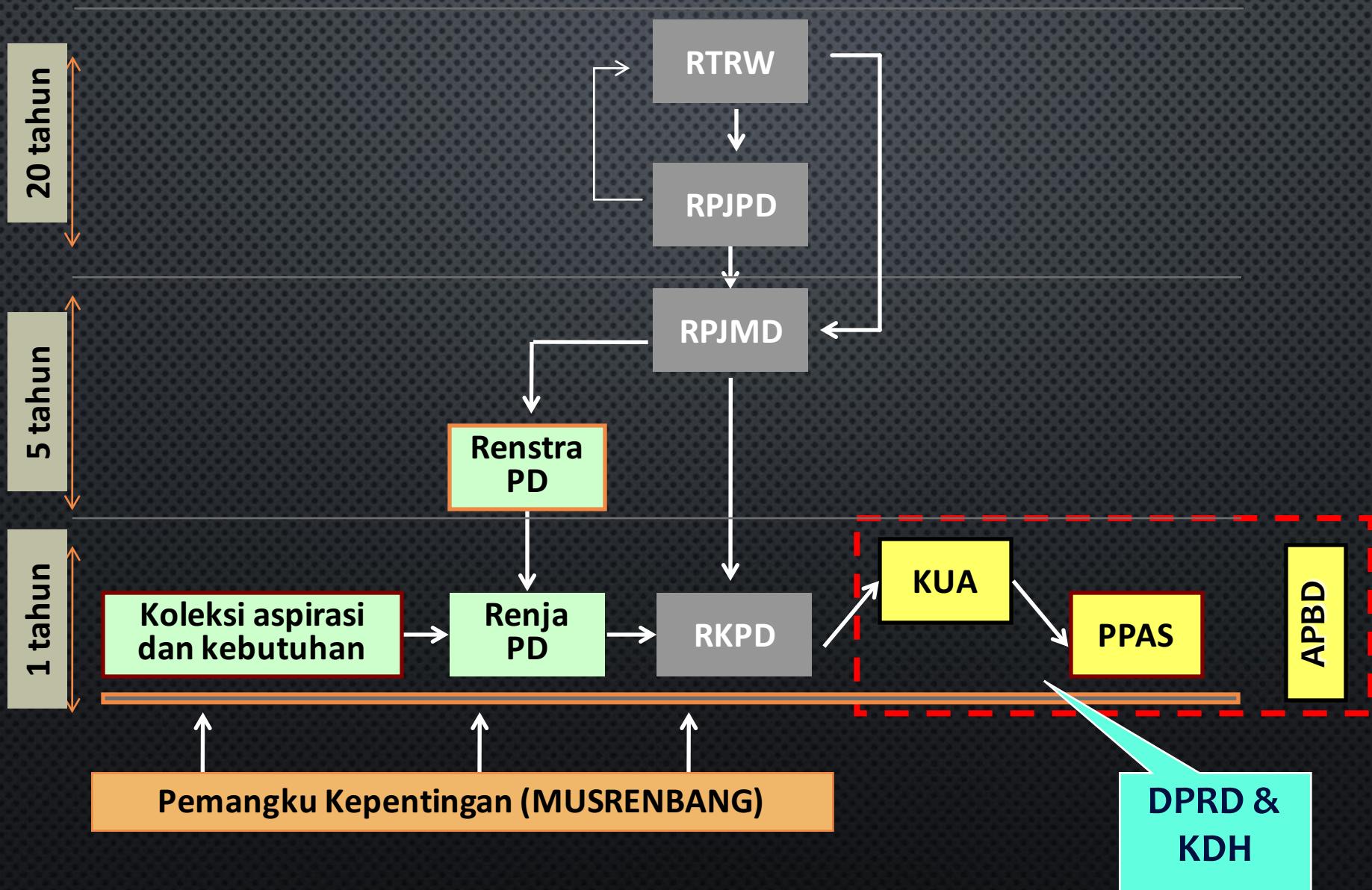


SINKRONISASI DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN (Dalam kerangka NKRI)



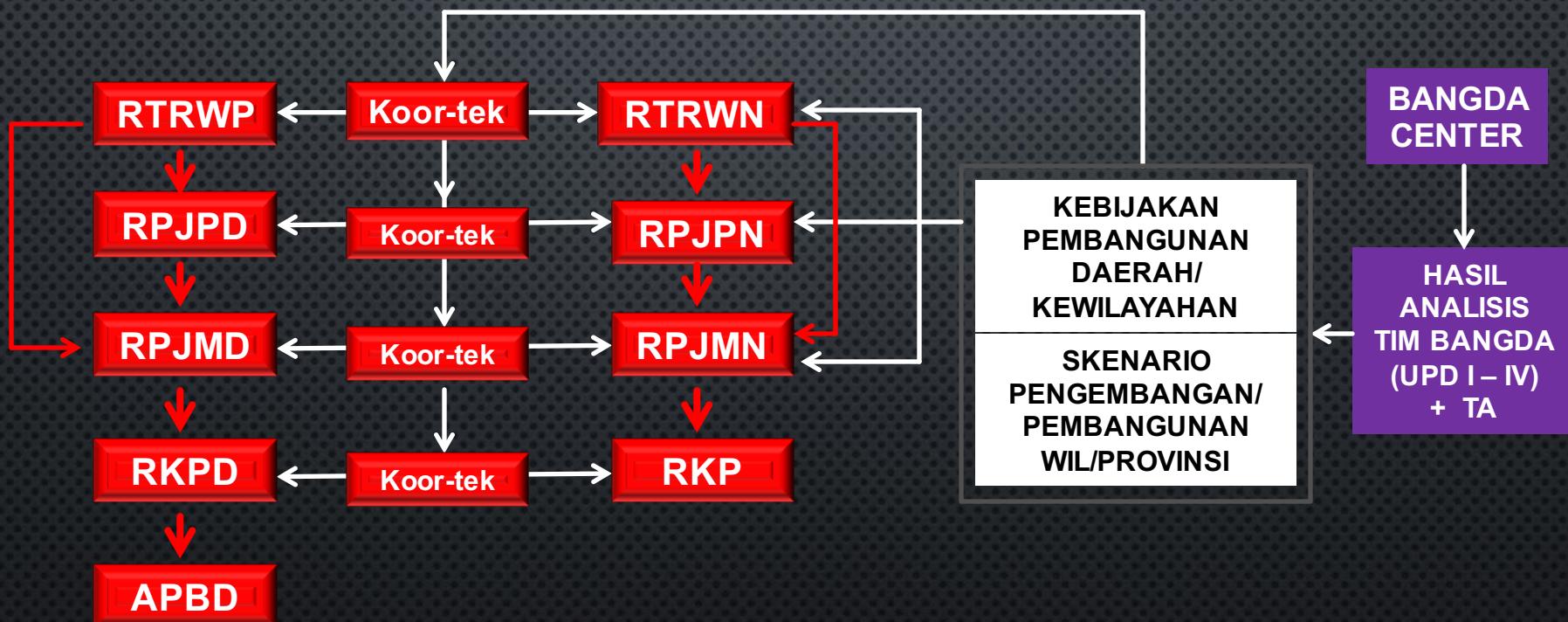


SEKUENSE PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH





PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH





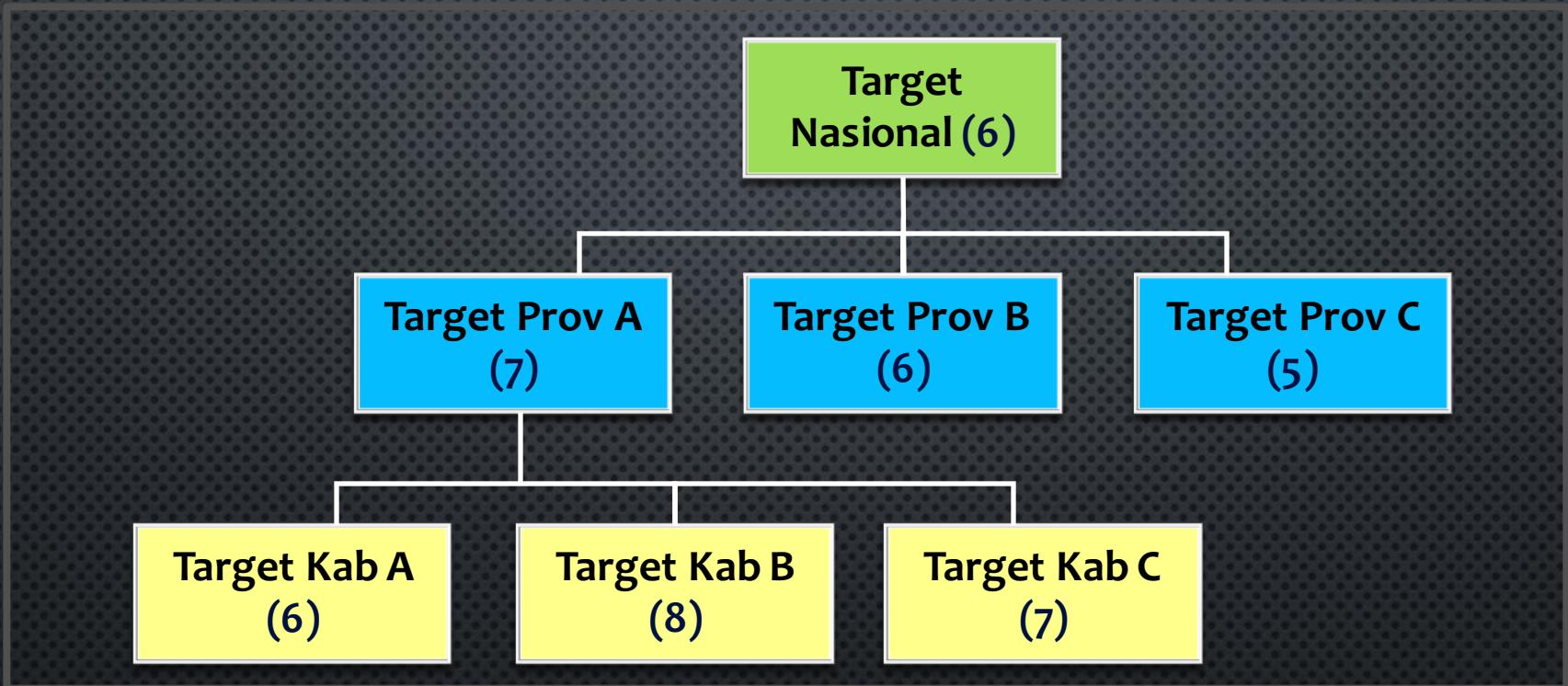
PENYELENGGARAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERMASALAHAN



PEMBINAAN PENYELENGGARAAN URUSAN

TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL



Berapa besar kontribusi sektor pertanian dlm upaya mewujudkan pencapaian target ini ?



INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)

TUJUAN PROGRAM :

**Berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian prioritas
RPJMN 2015-2019 diantaranya :**

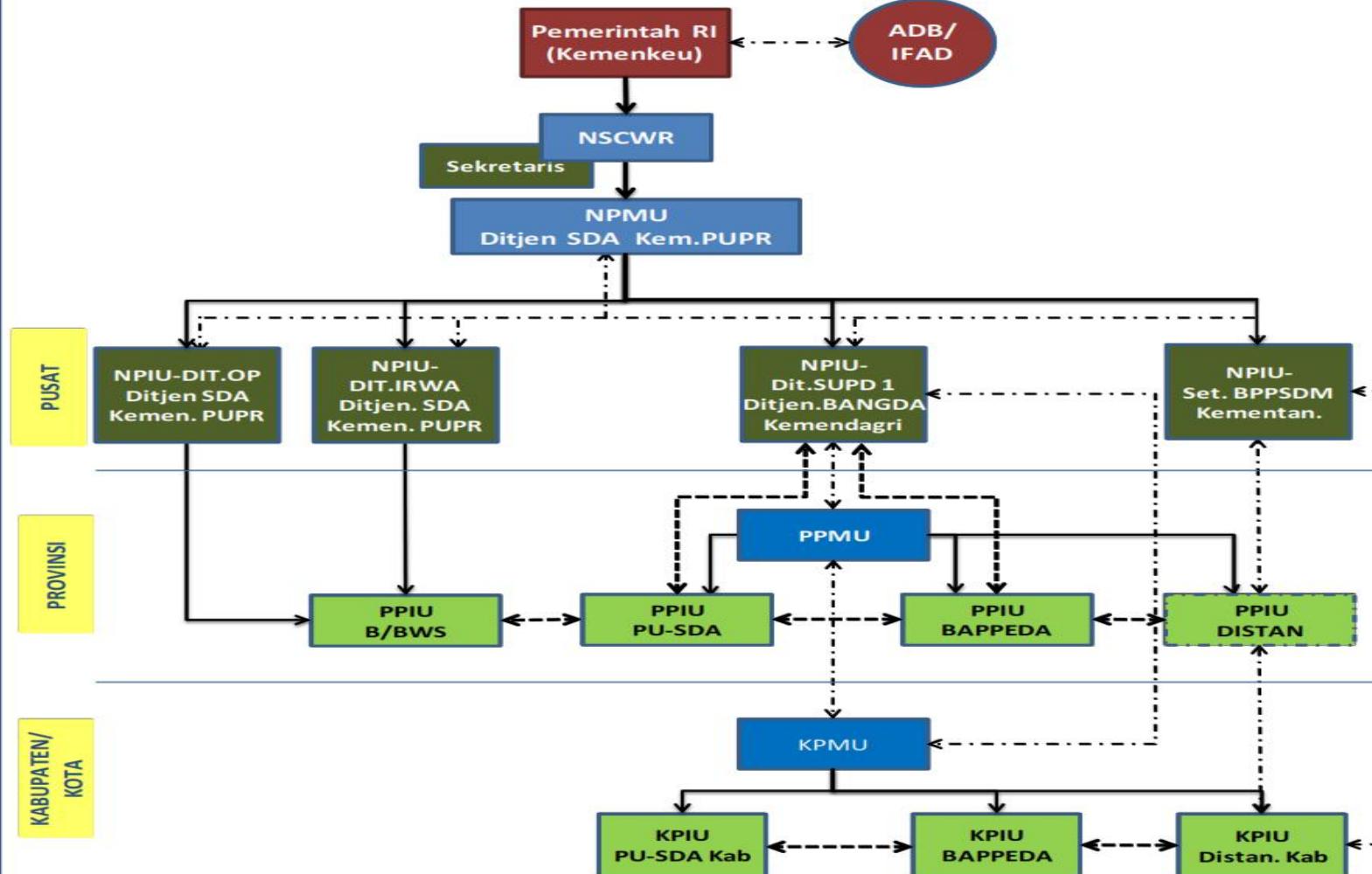
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan Kerusakan sedang dan berat
- Pengelolaan infrastruktur irigasi yang efektif dan berkelanjutan
- Pengembangan tanaman bernilai tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan petani di tingkat pedesaan
- Meningkatkan produksi beras dalam rangka pencapaian kedaulatan pangan

KELUARAN PROGRAM :

- 1. PENGUATAN KERANGKA KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN PERTANIAN BERIRIGASI;**
- 2. PENINGKATAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI;**
- 3. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SISTEM IRIGASI; DAN**
- 4. PENINGKATAN PENDAPATAN PERTANIAN BERIRIGASI**



STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN IPDMIP

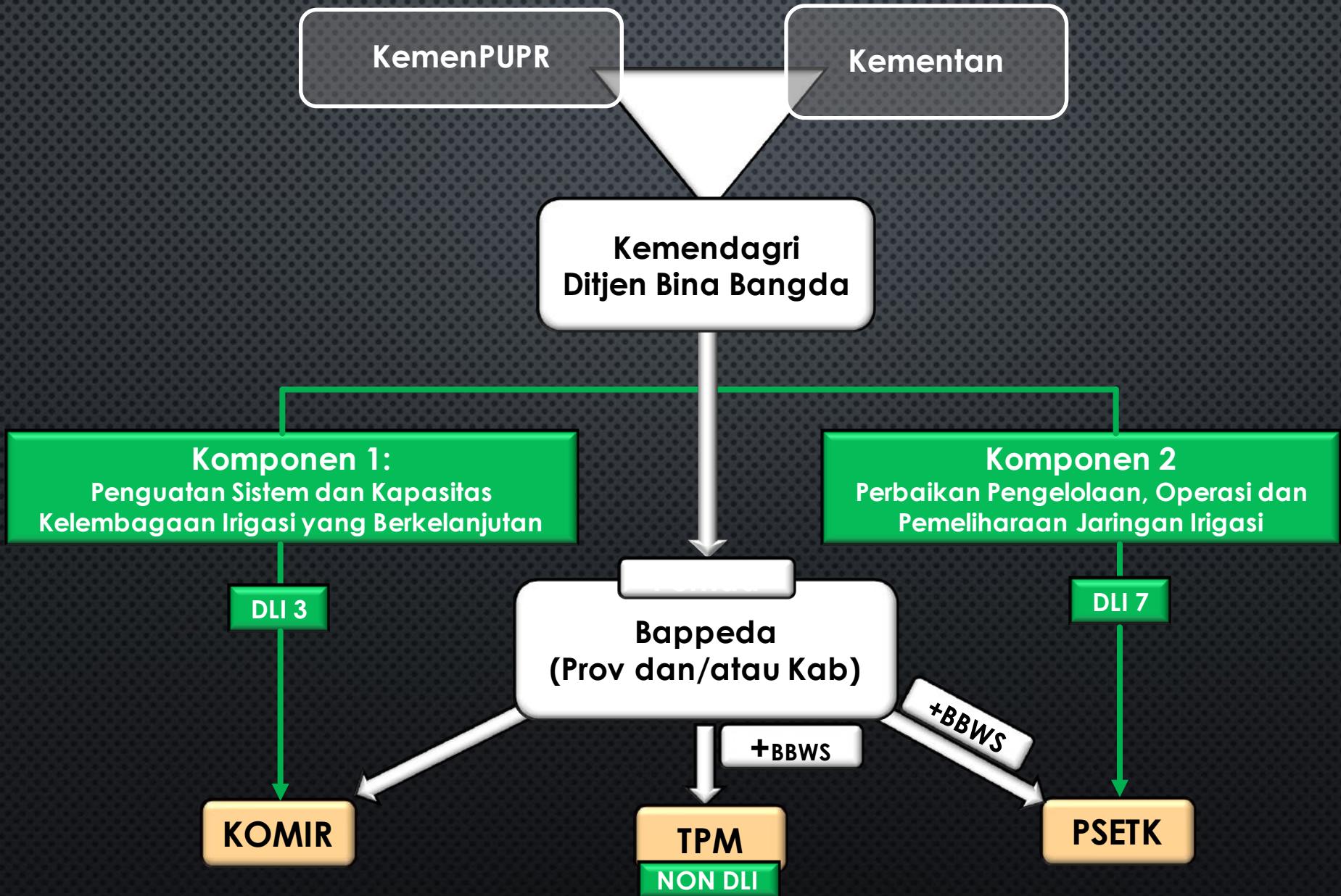


←→ Alur Bimbingan Teknis
→ Alur Koordinasi
→ Alur Instruksi

STRUKTUR ORGANISASI



POSI SI DITJEN BINA BANGDA DALAM IPDMIP





Disbursement Linked Indikator (DLI) IPDMIP

No	DLI	PPIU/DPIU	NPIU
1	DLI 1 - Peningkatan Indeks Kinerja Sistem Irigasi	BBWS/BWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab *)	Direktorat Bina O&P Ditjen SDA
2	DLI 2 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Irigasi	---	Direktorat Bina O&P Ditjen SDA
3	DLI 3 - Peningkatan Operasionalisasi Kelembagaan Irigasi (KOMISI IRIGASI)	Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1, Ditjen Bina Bangda
4	DLI 4 - Peningkatan Pengesahan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)	Dinas PU/SDA Kabupaten	Direktorat Bina O&P Ditjen SDA
5	DLI 5 - Peningkatan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)	Dinas PUPR Provinsi dan Kabupaten	Direktorat Bina O&P Ditjen SDA
6	DLI 6 - Peningkatan Operasionalisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	Dinas PU/SDA Kabupaten	Direktorat Bina O&P Ditjen SDA
7	DLI 7 - Penyusunan Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK)	BBWS/BWS **)	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1, Ditjen Bina Bangda
8	DLI 8 - Peningkatan Rehabilitasi Infrastruktur Irigasi	BBWS/BWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab *)	Direktorat Irigasi dan Rawa Ditjen SDA



TARGET CAPAIAN DLI KOMPONEN BANGDA

No	Indikator	Baseline	2017	s/d 2018	s/d 2019	s/d 2020	s/d 2021
1: Penguatan Sistem & Kapasitas Kelembagaan Irigasi Pertanian yang Berkelanjutan							
DLI 3	Komisi Irigasi beroperasion al penuh pada 74 Kabupaten 14 Provinsi 2021	33 KOMIR telah terbentuk pada 74 Kabupaten 14 Provinsi 2021	-	45 KOMIR Provinsi/Kabupaten beroprasional Penuh	55 KOMIR Provinsi/Kabupaten beroperasi al Penuh	65 KOMIR Provinsi/Kabupaten beroperasi al Penuh	88 KOMIR Provinsi/Kabupaten beroperasi al Penuh
2: Perbaikan Pengelolaan, Operasi & Pemeliharaan Irigasi							
DLI 7	Terbitnya Dokumen PSETK pada 719 Daerah Irigasi	-	-	Setidaknya 500 dokumen PSETK Terbit	719 dokumen PSETK Terbit	-	-



APA ITU PSETK ?



Gambaran data atau informasi mengenai keadaan sosial, ekonomi, teknis dan kelembagaan pada suatu daerah irigasi yang dibutuhkan oleh Kelembagaan Pengelola Irigasi untuk perencanaan program pemberdayaan kelembagaan petani daerah irigasi melalui P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi pertanian partisipatif.





UNSUR PENTING PELAKSANAAN IPDMIP





PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

MENGAPA PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG PENTING ?

"SEBAGAI PELAKU..."



"SEBAGAI PENGGEMBIRA"

PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN



COMMUNITY BASED DEVELOPMENT

- Pendekatan konstruksi sosial dari Berger dan Luckmannn (!980) → mengintegrasikan secara dinamik peran negara sbg pemegang mandat kekuasaan dari masy dengan mendorong inisiatif dan kreativitas masy, shg dpt menciptakan transformasi dengan berkembangnya partisipasi aktif masy dalam proses pembangunan
- **Partisipasi aktif masy mrpk bag terpenting** untuk menciptakan model pembangunan yg bertumpu pada masy (*community based development*) **dg melakukan pemberdayaan kepada masy.**





PERMASALAHAN PENYUSUNAN RTRW



Aksi Penolakan Rencana Tata Ruang

Publik atau masyarakat merasa **tidak pernah secara PROAKTIF diajak terlibat dalam penyusunan RTRW.**

Undang-Undang 26/2007 pasal 55 dan 60 “masyarakat berhak untuk terlibat mengajukan dan melakukan pengawasan dalam rangka penyusunan rencana tata ruang”.

PP Nomor 68 Tahun 2010 → Bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.



Sumber:

<http://....terkini.com/for-trust-....-ungkap-titik-kelemahan-penyusunan-tata-ruang-..../>



PERMASALAHAN PENERAPAN PERDA NO. X TAHUN 2011 TENTANG RTRW KOTA Y



Masyarakat 2 (dua) Kelurahan di Kawasan melakukan **demonstrasi** menuntut agar wilayah kelurahan mereka **tidak difungsikan sebagai Kawasan Lindung** sebagaimana amanat Perda No. x Tahun 2011 tentang RTRW Kota



Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota mencopot jabatan Kepala Dinas PU Kota dan sedang mengupayakan perubahan/alih fungsi Kawasan dari Kawasan Lindung menjadi Kawasan Budidaya → Revisi Perda ;

Sumber:

Hasil Rapat Konsultasi RTRW Kota



APA YANG DIINGINKAN ?



Diperolehnya data atau informasi otentik mengenai keadaan sosial, ekonomi, teknis dan kelembagaan pada suatu daerah irigasi sebagai dasar untuk perencanaan program pemberdayaan kelembagaan petani dan pengelolaan irigasi pertanian sebagai upaya untuk mendukung peningkatan kinerja sektor pertanian serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan nasional



TERIMA KASIH